

**REVISI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN, EKONOMI SERTA SOSIAL BUDAYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang saat ini sedang menggagas revisi terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 20 tahun 2007 tentang Pedoman Aspek Fisik dan lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tahun ini revisi pedoman tersebut masih difokuskan pada aspek fisik dan lingkungan dulu. Hal yang melatarbelakangi perlunya dilakukan revisi ini adalah telah terbitnya beberapa pedoman mengenai penyusunan tata ruang dari aspek lainnya sehingga **Permen PU 20/2007** ini perlu disinkronisasikan terhadap pedoman-pedoman tersebut. Selain itu variasi permasalahan aspek fisik dan lingkungan semakin banyak, sementara pedoman yang dibuat saat itu belum mengakomodir variasi permasalahan tersebut, sehingga perlu dimasukkan dalam pengaturan pedoman. Memang **Permen PU 20/2007** ini sejak ditetapkan sampai saat ini belum pernah dilakukan *review* bahkan revisi, sehingga dirasa banyak perubahan yang belum diakomodir.

Analisis fisik dan lingkungan mengenai karakteristik fisik yang berada pada kawasan perencanaan, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan. Analisis fisik dan lingkungan terbagi dalam dua aspek penting yaitu :

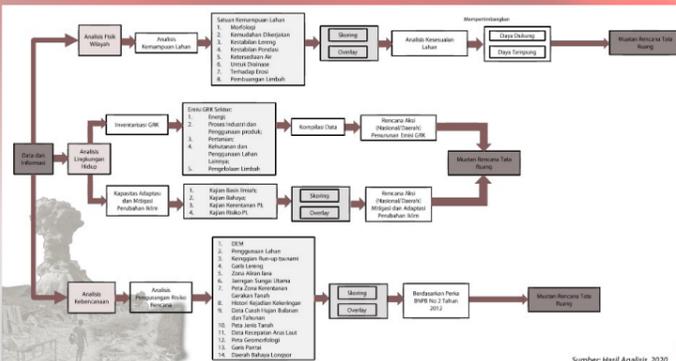
1. Aspek karakteristik fisik wilayah
2. Aspek potensi sumberdaya alam wilayah

Karakteristik wilayah akan terkait erat dengan manusia dan mahluk hidup di dalamnya, misalnya kondisi fisiografis, topografis, geologi, jenis tanah, iklim dan sebagainya. Sedangkan potensi sumberdaya alam akan terkait potensi yang dimiliki suatu wilayah dan yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan nilai tambah. Kedua aspek ini akan menjadi dasar dalam menghitung analisis kemampuan lahan dan kesesuaian lahan, yang merupakan rekomendasi aspek fisik dan lingkungan untuk merencanakan pola ruang dan struktur ruang.

Jika dibandingkan **Permen PU 20 tahun 2007**, substansi revisi pedoman ini memiliki beberapa perbedaan, misalnya dipisahkannya aspek kebencanaan menjadi analisis tersendiri, diluar satuan kemampuan lahan yang lain. Analisis kebencanaan ini adalah analisis pengurangan resiko bencana. Selain itu juga terdapat penambahan analisis yaitu analisis lingkungan yang

terdiri dari Inventarisasi Gas Rumah Kaca, serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Secara lengkap dapat dilihat pada skema di bawah ini :



Pedoman ini tidak menentukan secara eksplisit metode yang harus dilakukan dan data apa saja yang harus digunakan. Untuk itu pada tahun ini juga di BIG dilakukan kegiatan secara paralel untuk menurunkan aspek analisis fisik dan lingkungan ini pada kebutuhan data dan metodenya. Diharapkan dengan terintegrasinya kedua pedoman ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana tata ruang khususnya dari aspek geospasial. [Ryan Pribadi, 2020]

**UPACARA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-75 DI TENGAH PANDEMI COVID19**

Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan tahun ini Republik Indonesia genap berumur 75 tahun. Namun ada yang berbeda dengan peringatan HUT Kemerdekaan kali ini. Adanya pandemi Covid19, masyarakat tidak bisa menyaksikan secara langsung Peringatan Detik-Detik Upacara Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta, namun masyarakat dapat menyaksikannya secara virtual.

Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-492/M-Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Pedoman Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020, upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta, dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid19. Upacara hanya dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua MPR, Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri, petugas upacara lainnya, serta tidak mengundang pejabat dan masyarakat.

Pedoman ini juga mengatur bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 - 10.20 WIB (selama 3 menit), seluruh masyarakat Indonesia berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah. Pengecualian aktivitas yang membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.

Hal ini juga berlaku untuk para pejabat dan ASN di lingkungan Badan Informasi Geospasial, wajib mengikuti upacara Peringatan ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan di stasiun televisi dari kantor dan tempat tinggal masing-masing.



**Dirgahayu Republik Indonesia ke 75 !**

[Prita Brada Bumi, 2020]



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
Gedung F Lantai 2  
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613  
Fax - PPTRA : (021) 8764613  
Email : redaksi.ptra@gmail.com  
Twitter : @pptra\_big  
Instagram : @pptra\_big  
http://big.go.id/newsletter/



**TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER**

Media Informasi Pemetaan Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas

**Catatan Beranda**



INDONESIA MAJU

menyiapkan dukungan data dan Informasi Geospasial melalui percepatan penyelenggaraan Informasi Geospasial, percepatan kebijakan Satu Peta, dan percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang khususnya pada skala operasional, yakni Rencana Detail Tata Ruang.

Pada 2019, PTR/BIG telah menyelesaikan rekomendasi Peta RDTR di 57 lokasi yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS). Selanjutnya Kementerian ATR/BPN tahun ini sedang mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk bisa dbuatkan Perda-nya. Pada tahun 2020 ini, sedang diusulkan 76 RDTR lagi untuk bisa diimplementasikan dalam sistem OSS pada tahun mendatang. Hal ini merupakan amanah baru bagi PTR/BIG untuk mendukung percepatan penyusunan tambahan peta RDTR terekomendasi untuk OSS. Selain itu, PTR juga sedang memproses finalisasi bantuan teknis 80 Peta RDTR dengan target penyelesaian rekomendasi pada oktober 2020. Semua RDTR ini, diharapkan dapat diimplementasikan dalam OSS untuk pembangunan ekonomi dan investasi.

Setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, telah menyepakati komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) 2015-2030. TPB terdiri atas 17 tujuan dan 169 target dengan 319 indikator. Indonesia berkomitmen serius dalam melaksanakan TPB dan walaupun dengan merebaknya pandemi COVID 19 kita tetap optimistis mampu meraih hasil baik. Identifikasi Informasi Geospasial Tematik untuk memetakan indikator-indikator TPB sedang dilakukan oleh Kedepuitan Bidang IGT-BIG. Untuk mendukung TPB ini, PTR/BIG melaksanakan kegiatan pemetaan TPB, yaitu penyusunan Atlas SDGs dan menyusun *prototype* pemetaan SDGs sampai pada tingkat Desa. Integrasi Spasial Statistik menjadi keharusan untuk menyajikan capaian TPB yang akurat.

Tidak lupa, untuk menutup beranda kali ini kami keluarga besar PTR-BIG mengucapkan: **Dirgahayu Kemerdekaan RI ke 75**. Semoga Indonesia Maju segera terwujud. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada pepatah melayu "Sebelum ajal berpantang mati". Kita tidak boleh mudah menyerah atau putus asa walaupun banyak tantangan dan rintangan dalam melaksanakan aktivitas ditengah-tengah pandemi. Dan akhirnya, tidak lupa juga "Selamat Tahun Baru Muharram 1442H", Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita semua diberikan kesehatan. Selamat berkarya! [Dr. -Ing. Khafid]

Bismillahirrahmanirrahim. Pada peringatan 75 Tahun Indonesia Merdeka tahun 2020 ini, diwarnai dengan pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dengan berbagai penyesuaian dengan menempatkan prinsip "Safety First", peringatan tetap dijalankan dengan modifikasi dan inovasi untuk tetap memberikan optimisme mengisi Meski demikian, janganlah kita seperti pepatah melayu : "Katak ditimpa kemarau". Pepatah Melayu tersebut memiliki makna tentang berkeluh kesah yang tidak ada juntrungnya. Sebagai manusia yang kemerdekaan menuju "Indonesia Maju".

Dalam HUT RI ke-75 kali ini, Indonesia mengambil tema peringatan hari 17 Agustus 2020 dengan 'Indonesia Maju' dengan tetap berkomitmen pembangunan infrastruktur, SDM, menciptakan lapangan kerja. Indonesia Maju juga menggambarkan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Online Single Submission* (OSS) Dalam Mengawal Investasi menuju Indonesia Maju. Dalam meningkatkan stabilitas iklim investasi di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Sistem Perizinan Terpadu Daring (*Online Single Submission*/OSS). Melalui sistem baru ini, izin berusaha dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu untuk mendukung OSS diperlukan dukungan data yang komplit, akurat, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan diberbagipakaikan. Untuk ikut mewujudkan Indonesia Maju melalui OSS, Badan Informasi Geospasial berkontribusi dengan

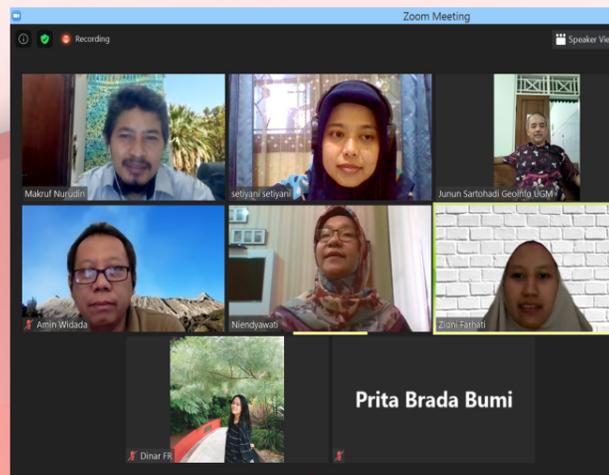
REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |

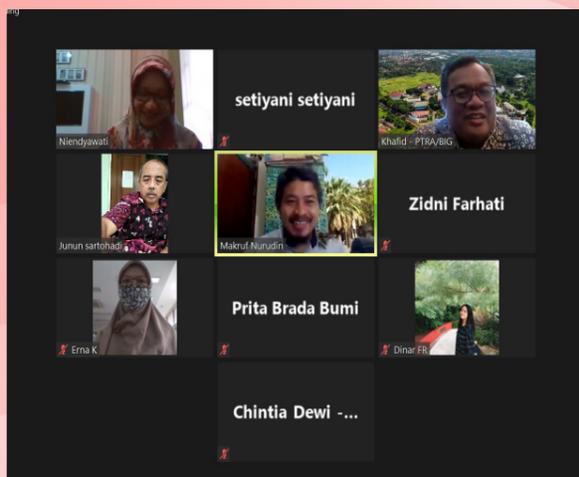
| Editor: Prita Brada Bumi, Sri Eka Wati, Chintia Dewi, Izzuddin Abdul Aziz |

| Desain Tata Letak: Gin Gin Gustiar |

PERSIAPAN SURVEI TAHAP 2 ATLAS BENTANG SUMBERDAYA GUNUNGAPI



Discussion (FGD) online yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020. FGD ini membahas tentang rencana titik-titik obyek sumberdaya yang akan disurvei, pembagian tim, penentuan jalur survei, tanggal pelaksanaan survei, mekanisme pelaksanaan survei pada saat pandemi Covid 19. Pengumpulan data terdiri dari pengambilan foto atau gambar dengan drone/kamera, titik koordinat, titik ketinggian, dan deskripsi obyek. Titik obyek sumberdaya yang akan diambil dapat mewakili pada setiap morfologi gunungapi yaitu puncak, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah dan lereng kaki. Berdasarkan hasil FGD tim dari BIG akan didampingi oleh narasumber dan asisten dosen dengan pelaksanaan survei rencana tanggal 5-13 September 2020. [Setiyani, 2020]



Penyusunan Atlas Bentang Sumberdaya Gunung Api Jawa Bagian Barat merupakan salah satu bentuk dukungan dan kontribusi BIG terhadap penyediaan informasi geospasial bagi pembentuk kebijakan maupun masyarakat/publik. Atlas ini nantinya dapat digunakan oleh masyarakat, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, sebagai informasi spasial/keruangan terkait sumberdaya Gunungapi. Dalam rangka melengkapi data dan informasi pada atlas tersebut, diperlukan survei pengumpulan data terkait sumberdaya gunungapi di wilayah Jawa Barat. Survei pengumpulan data dilakukan dalam 2 tahap. Tahap I survei dilakukan di Kompleks Gunung Gede dan sebagian Gunung Salak pada tanggal 4-7 Agustus 2020. Sedangkan survei tahap 2 akan dilakani di Kompleks G. Tangkuban Perahu, G. Guntur, G. Kendang, G. Papandayan, G. Galunggung, G. Talaga Bodas, Karaha Kawah, dan G. Ciremai.

Survei tahap 2 ini rencana akan melibatkan narasumber dan tim dari Universitas Gadjah Mada. Untuk mematangkan pelaksanaan survei tahap 2 maka perlu persiapan dengan mengadakan Focus Group

INTEGRASI IGT SDA UNTUK Mendukung PENYUSUNAN KLHS RPJMD KAB/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

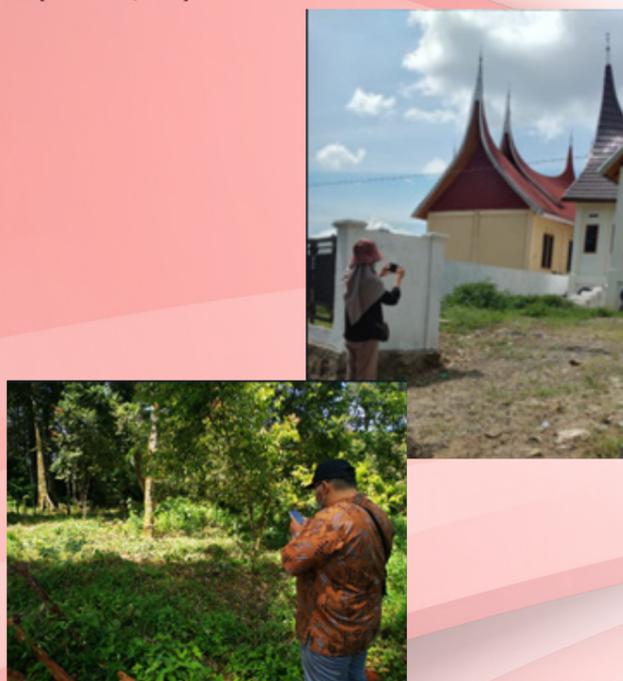


Kegiatan Integrasi IGT SDA untuk Mendukung Penyusunan KLHS RPJMD Kab/Kota yang pada tahun ini dilaksanakan untuk 4 wilayah kajian yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar serta Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat, telah memasuki tahapan kegiatan survei lapangan. Kegiatan survei lapangan ini dilakukan dalam rangka uji akurasi dan ground check hasil digitasi yang telah dilakukan oleh pelaksana pekerjaan. Kegiatan ini juga sekaligus melakukan collecting data sekunder melalui Pemerintah daerah di wilayah kajian. PT. Das Map dan PT. Miranti Konsultan sebagai pelaksana 2 paket pekerjaan kontraktual di Bidang PDS-PTRA ini, melakukan survei lapangan secara bersamaan pada tanggal 9 s.d 15 Agustus 2020. Tim Supervisi teknis yang mendampingi para pelaksana pekerjaan ini juga secara simultan melakukan pendampingan mulai tanggal 10 s.d 14 Agustus 2020.

Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemik Covid-19, tim supervisi bersama tim teknis pelaksana pekerjaan melakukan kunjungan ke pemerintah daerah dan dinas terkait di wilayah kajian. Ground check lapangan juga dilakukan pada titik-titik yang menjadi sampel dalam kegiatan ini. Secara teknis, collecting data dan ground check yang dilakukan yaitu dengan membagi tim serta wilayah kerja setiap harinya. Koordinasi antara tim supervisi teknis dengan tim teknis pelaksana pekerjaan dilakukan setiap hari untuk melakukan evaluasi atas kegiatan harian dan perencanaan di hari berikutnya.

Secara umum, pemerintah Kabupaten/Kota menyambut baik adanya kegiatan Integrasi IGT SDA untuk Mendukung Penyusunan KLHS RPJMD Kab/Kota di wilayah kajian. Harapan yang disampaikan adalah agar hasil kajian kegiatan ini nantinya benar-benar dapat diterima dan digunakan oleh mereka

selaku pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah masing-masing, sebagai kajian yang memperkaya saran dan masukan dalam melakukan pembangunan di wilayahnya, khususnya yang berkaitan dengan sumberdaya alam. [Moeni-roch, 2020]



PERAN BIG PENYUSUNAN NERACA SUMBERDAYA ALAM KAWASAN KONSERVASI LAUT

Sumberdaya alam kelautan adalah aset yang harus dihitung sehingga dapat mendukung efektivitas pengelolaan kawasan dan membangun insentif konservasi laut di Indonesia. Penghitungan aset kelautan tersebut diawali dengan penyusunan neraca sumberdaya alam Kkelautan khususnya untuk kawasan konservasi laut, seperti yang telah dilakukan pada sumber daya hutan, air, tanah dan pertambangan. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan walidata terhadap sumberdaya kelautan mengadakan FGD pada tanggal 28 Agustus 2020, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait metode penghitungan neraca, valuasi ekonomi dan pemetaan sumberdaya alam kelautan, dengan mengundang beberapa instansi BPS, LAPAN, BIG, LIPI, DJKN Kementerian Keuangan, dan Kemendagri. Instansi yang hadir diharapkan dapat bersinergi dalam melakukan penyusunan neraca sumberdaya alam kawasan konservasi perairan demi menciptakan keberlanjutan keberadaan kawasan konservasi perairan.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup menurunkan mandat kepada BPS untuk menyusun Sistem terintegrasi neraca lingkungan dan ekonomi Indonesia, namun terkait sumberdaya alam kelautan dan perikanan belum terwakili. Ibu Etjih Tasriah dari BPS menyampaikan bahwa Neraca Sumber Daya alam atau Natural Capital Accounting (NCA) berfungsi untuk mencatat stok ketersediaan sumberdaya alam dan perubahannya untuk setiap jenis aset lingkungan,

yang disusun dalam satuan fisik dan moneter. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu jenis aset lingkungan, sehingga BPS mendukung penuh untuk penyusunan neraca sumberdaya alam kawasan konservasi laut sehingga dapat melengkapi neraca lingkungan dan ekonomi Indonesia. Salah satu instrumen yang dibutuhkan ada data atau informasi spasial terkait aset lingkungan.



Peran BIG diharapkan dapat mendukung penyusunan neraca sumberdaya alam kawasan konservasi ini terutama dalam metode penyusunan neraca spasial. Neraca spasial sumberdaya alam laut telah dilakukan BIG sampai dengan tahun 2012 dan telah mengeluarkan Pedoman Penyusunan Neraca dan Valuasi Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut pada tahun 2005. Pedoman tersebut berpotensi untuk ditingkatkan dan diterapkan dalam penyusunan neraca spasial sumberdaya alam kelautan ke depan. Selain itu BIG juga dapat berperan dalam penyediaan peta sumberdaya kelautan yaitu pada Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik karena sampai saat ini BIG masih melakukan pemetaan eksisting dengan tema mangrove, karang dan lamun yang bekerjasama dengan instansi walidata.

Selain BPS dan BIG, instansi lain seperti DJKN Kemenkeu, LAPAN dan Akademisi juga menyampaikan masukan berupa saran dan kritik terkait penyusunan neraca sumberdaya kawasan konservasi perairan. Hasil dari FGD ini dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam pengelolaan efektivitas kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan di Indonesia. [Rahmatia Susanti, 2020]

HARMONISASI PERATURAN MENTERI ATR BPN TERKAIT BASIS DATA PETA RTR DALAM REVISI KUGI

Perkembangan penggunaan data dan informasi geospasial dari masa ke masa menuntut data dan informasi geospasial dapat digunakan di berbagai jenis perangkat pengelola dan penampil oleh berbagai pihak. Penyelenggara/penyedia data diamanatkan untuk menyediakan data yang mampu untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Hal ini tertuang dalam Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia mengenai interoperabilitas data.

Dengan data yang memenuhi kaidah interoperabilitas data maka dalam berbagi pakai data, data tersebut bisa diintegrasikan satu sama lain. Untuk mengintegrasikan data-data tersebut maka dibutuhkan standar data dan kode referensi. Penerapan satu standar data yang sama pada seluruh data yang dimiliki oleh para penyelenggara/penyedia data maka akan memudahkan proses integrasi data karena memiliki struktur data yang sama.

Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) adalah pemberian kode dan struktur kode, penetapan tipe, operasi, atribut, asosiasi, dan aturan-aturan pendokumentasian atas unsur yang direpresentasikan dalam data geografis. Katalog ini merupakan suatu sistem yang berisi unsur dan atribut yang dapat digunakan oleh produsen dan pengguna informasi geografis dalam membangun struktur data geografis. Tujuan penyusunan katalog unsur geografi adalah untuk mempermudah terwujudnya penggunaan data secara bersama maupun pertukaran data antara produsen dan pengguna data geografis. KUGI merupakan instrumen dalam salah satu pilar Kebijakan Satu Peta: Satu referensi, satu standar, satu basis data, satu geoport.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, dalam perkembangannya menyusun Informasi Geospasial Tematik Tata Ruang menyadari perlunya keseragaman yang pasti mengenai unsur, domain, dan klasifikasi dalam penyusunan peta. Didapatkan ketidakseragaman klasifikasi pola ruang dan struktur ruang yang disusun oleh pemerintah daerah / provinsi dan antar direktorat pada Kementerian ATR/BPN sendiri.

Terlebih menuju sistem Online Single Submission (OSS) di bidang investasi dan perijinan, peta rencana tata ruang dalam hal ini Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diharuskan menjadi peta berbasis online yang menjadi dasar secara spasial

dalam proses perijinan dan investasi. Diperlukan keseragaman aturan-aturan basis data yang jelas dalam proses manajemen dan publikasinya.

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) – BIG dalam mengawal pembinaan IGT Tata Ruang yang disusun oleh pemerintah daerah sudah menyampaikan perlunya keseragaman ini sejak dari awal dilaksanakannya pengawalan pembinaan, dikarenakan tiap-tiap daerah memiliki keinginan yang berbeda dalam menuliskan kawasan/zona yang mereka rencanakan. Dalam pengawalannya, PPTRA BIG selama ini mengarahkan supaya pemerintah daerah menggunakan klasifikasi yang termuat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN terkait Pedoman Penyusunan Peta RTR, walaupun tidak spesifik terkait basis data, namun hirarki klasifikasi kawasan dan zona dapat diacu dari peraturan tersebut. Saat ini belum diarahkan menuju KUGI dikarenakan belum implementatif dalam mengakomodir kebutuhan Rencana Tata Ruang.

Kementerian ATR/BPN dalam perkembangannya telah menyusun Peraturan Menteri terkait Standar Basis Data Peta Rencana Tata Ruang guna mendukung kebutuhan tersebut. Standar basis data berupa Peraturan Menteri ATR/BPN tersebut sesuai aturan peraturan perundangan merupakan bahan dari produsen dan walidata IGT dalam memperbaharui Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) yang sudah ada di Indonesia, yang saat ini sudah mencapai versi 5. Dalam revisinya, KUGI memerlukan bahan dasar revisi berupa peraturan yang jelas, Peraturan Menteri ATR/BPN ini seharusnya bisa menjadi bahan dasar revisi tersebut.

Perlu dilakukan harmonisasi lebih lanjut dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan aturan dan klasifikasi yang ada dalam Peraturan Menteri ATR/BPN terkait Basis Data Peta RTR ke dalam revisi KUGI selanjutnya. Dari pihak Kementerian ATR/BPN terutama Studio Peta dan Pusdatin telah mengikuti perkembangan terakhir ini, dan bersedia untuk mengawal revisi KUGI berikutnya supaya aturan dan kebutuhan basis data Rencana Tata Ruang yang diinginkan masuk ke dalam KUGI dan dapat terakomodir dan terimplementasi ke depannya. [Marhensa Aditya Hadi, 2020]

**KUTAI KARTANEGARA, KEMBALI MENERIMA REKOMENDASI PETA RDTR**



Setelah berhasil menerima surat rekomendasi di tahun 2019, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari jumat, 7 Agustus 2020, kembali menerima yang ke-10 untuk RDTR Muara Badak. Pencapaian yang luar biasa dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun telah berhasil membawa 10 surat rekomendasi.

Lebih dikenal dengan nama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salahsatu kabupaten yang digadang-gadangkan untuk menjadi calon Ibu Kota Negara. Dengan beberapa hal strategis tersebut membuat pemerintah daerah sangat bersemangat dalam menyusun RDTR-nya.

Dipimpin oleh Dr. Ing. Khafid, proses sidang pleno berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang besar. Muara badak merupakan salahsatu kecamatan yang berada di pesisir sebelah barat Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan Muara Badak lebih banyak pada kawasan hijau yang berupa hutan dan perkebunan. Adapun perubahan pada kawasan budidaya berupa pemukiman tidak terlalu signifikan mengingat operasi salahsatu tambang telah berhenti sehingga tidak menimbulkan penambahan jumlah penduduk.

Proses pengujian dilakukan oleh Dr. Mulyanto Darmawan, M.Sc selaku peneliti utama BIG. Proses pengujian dimulai dari sumber data, peta dasar, peta tematik peta rencana hingga album peta secara komperhensif. Didampingi oleh Setianto Nugroho Aji SH,MH, selaku kepala dinas, tim RDTR Muara Badak bisa dengan lancar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji. Hingga saat ini masih terdapat dua RDTR yang belum mendapatkan rekomendasi di Kutai Kartanegara dari total 12 RDTR. Harapannya dalam waktu dekat, bisa segera direkomendasi, sehingga selanjutnya bisa kemudian berfokus pada produk RTR lainnya seperti revisi RTRW dan RTR Raperpres IKN. [Chintia Dewi, 2020]



**PENGUKURAN TITIK KONTROL TANAH UNTUK PENYUSUNAN PETA RDTR SUNGGUMINASA**



Berkali-kali pengukuran titik kontrol tanah untuk kegiatan penyusunan peta RDTR Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Agustus - 1 September 2020. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka bantuan teknis pembuatan peta dasar kerjasama BIG dengan Kementerian ATR/BPN untuk percepatan penyelesaian penyusunan rencana tata ruang khususnya RDTR. RDTR Sungguminasa termasuk kedalam kelompok cluster 3 dimana sudah memiliki sumber data Citra namun memerlukan proses Orthorektifikasi.

Proses Orthorektifikasi merupakan proses koreksi geometris untuk mengeliminasi kesalahan akibat perbedaan tinggi permukaan bumi serta proyeksi akuisisi citra yang umumnya tidak ortogonal. Dalam proses Orthorektifikasi, dibutuhkan titik kontrol tanah sebagai acuan dalam mengoreksi geometris citra tersebut.

Titik kontrol tanah yang ada di Kecamatan Sungguminasa tidak memenuhi jumlah minimal untuk melakukan Orthorektifikasi sehingga perlu dilakukan pengukuran titik kontrol tanah tambahan. Tim berkoordinasi dahulu dengan Pemerintah Daerah yaitu PUPR Kab Gowa dan Kantor Kecamatan Sungguminasa

membahas terkait rencana titik dan kendala yang mungkin dihadapi serta solusinya. Pengukuran titik kontrol tanah kemudian dilakukan dengan menggunakan metode statis. Titik pengamatan CORS di STO telkom Makassar (CMAK) digunakan sebagai Base selama pengukuran berlangsung. Lama waktu pengamatan 50 menit dengan selang waktu perekaman titik adalah 15 detik.

Titik terdiri dari GCP (Ground Control Point) dan ICP (Independent Check Point) dengan memprioritaskan posisi titik pada fondasi atau sudut bangunan yang terlihat jelas di lapangan dan dapat diidentifikasi pada citra satelit. Titik kontrol tanah yang diukur berjumlah 36 titik yang terdiri dari 20 titik GCP dan 16 titik ICP. Terdapat beberapa titik yang mengalami perubahan posisi karena titik yang semula direncanakan untuk dilakukan pengukuran sulit dijangkau atau tidak diizinkan untuk dilakukan pengukuran. Selama pengukuran terdapat 3 titik yang tidak memenuhi standar (float) sehingga harus dilakukan pengukuran ulang. Setelah melakukan pengukuran ulang untuk titik yang tidak memenuhi standar dilakukan pengolahan Baseline, semua titik yang diukur memiliki status Fixed dan ketelitiannya masuk toleransi sehingga siap dipakai untuk proses selanjutnya yaitu Orthorektifikasi citra satelit. [Izuddin Abdul Aziz, 2020]



**SURVEI NERACA SUMBERDAYA ALAM UNTUK Mendukung KLHS KABUPATEN AGAM DAN Kota Bukittinggi**

Kegiatan survei yang dilakukan meliputi kunjungan instansi untuk mengumpulkan data sekunder, survei sampel penutup lahan dan pengecekan lokasi pos pemantauan debit sungai (AWLR, Automatic Water Level Recorder). Kunjungan instansi dilakukan di Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (BPSDA) Sumatera Barat, Stasiun Klimatologi Sicincin, UPTD PSDA Bukittinggi, dan Bappeda Kota Bukittinggi. Survei penutup lahan dilakukan berdasarkan sampel lapangan yang telah ditentukan di studio, sedangkan pengecekan pos AWLR dilakukan secara sensus untuk seluruh pos yang terdapat di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

Survei instansional dilakukan pada 4 instansi di Sumatera Barat, yaitu Balai PSDA Provinsi Sumatera Barat, UPTD PSDA Kota Bukittinggi, Stasiun Klimatologi Sicincin, dan BAPALITBANG Kota Bukittinggi. Tujuan dari kunjungan instansi ini adalah mengumpulkan data pendukung untuk analisa neraca sumberdaya alam, khususnya untuk neraca sumberdaya air dan analisis spasial kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Survei pengecekan lokasi pos AWLR dilakukan untuk melakukan verifikasi keberadaan dan kondisi pos AWLR di lapangan. Cek dan validasi ini penting kaitannya dalam proses pemodelan hidrologi pada saat perhitungan ketersediaan sumberdaya air dalam analisis neraca sumberdaya air. Lokasi pos duga air digunakan sebagai batas daerah tangkapan air yang tercatat sebagai debit pada pos AWLR, sehingga ketepatan lokasi pos akan mempengaruhi ketepatan penentuan daerah tangkapan airnya.

Jumlah sampel penutup lahan ditentukan berdasarkan Peta Tentatif Penutup Lahan tahun 2019 sebanyak 225 titik. Sampel ini tersebar secara proporsional pada setiap kelas penutup lahan dan merata pada area kajian. Hanya terdapat 223 titik sampel yang berhasil dicek di lapangan dikarenakan beberapa kendala, salah satunya adalah akses jalan yang tertutup karena jembatan putus sehingga lokasi sampel tidak dapat diakses. [Gunawan, 2020]



**SUPERVISI KEGIATAN PEMBUATAN ATLAS INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) TAHUN 2020**

Kegiatan survei lapangan tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 23 - 28 Agustus 2020. Sedangkan tahap berikutnya direncanakan pada bulan September 2020. Pelaksanaan survei masing-masing selama 5 hari (termasuk perjalanan dari Jakarta menuju masing-masing ibukota provinsi). Tahap pertama pelaksanaan survei ke Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan tahap kedua direncanakan ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan kegiatan survei mengalami keterlambatan tidak sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya dikarenakan menunggu dan memastikan kondisi penyebaran - covid-19 di 5 provinsi tersebut pada kondisi aman dan terkendali.

Kegiatan yang dilakukan oleh tim supervisi Pusat PTRA adalah mendampingi konsultan dalam mencari dan mengumpulkan data-data statistik capaian indikator TPB di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Data-data ini pada umumnya tersaji pada dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang disusun oleh Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun demikian, tidak semua indikator termuat dalam dokumen tersebut, sehingga dibutuhkan pencarian data-data indikator tersebut di instansi sektoralnya, misalnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

Tidak kalah pentingnya dari kegiatan survei ini adalah mendokumentasikan aktivitas dan obyek-obyek infrastruktur fisik di daerah yang mewakili rencana aksi dan capaian indikator TPB. Beberapa contoh diantaranya adalah obyek dan aktivitas pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, pariwisata, kebudayaan, sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya. Untuk

memperkaya dokumen atlas yang akan disusun, tim survei juga memotret landmark atau obyek fisik yang khas mewakili daerah setempat seperti tugu/monumen, rumah adat/kerajaan, taman kota, tempat ibadah, obyek wisata, dan sebagainya. [Amin Widada Lestariya, 2020]



**PENYEPAKATAN METADATA INDIKATOR SDGS EDISI II TUJUAN 11**

Tahun 2020 ini merupakan tahun ke lima pelaksanaan SDGs baik ditingkat global maupun di Indonesia sendiri. Selama lima tahun ini pelaksanaan SDGs di Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen Metadata SDGs Edisi I. Dalam pelaksanaannya metadata SDGs edisi I tersebut memiliki beberapa kendala terkait sumber data yang digunakan, baik karena data yang diminta tidak tersedia maupun rumus yang digunakan untuk menggambarkan capaian indikator tidak sesuai. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian metadata dengan ketersediaan data dan kesesuaian rumus indikator.

Moment lima tahun pelaksanaan SDGs ini digunakan UN-STAT untuk merubah jumlah indikator di tingkat global yang pada tahun 2016 berjumlah 241 dan pada April 2020 telah menjadi 247 indikator serta terjadinya perubahan metadata indikator global. Moment ini juga digunakan Koordinator SDGs Indonesia, dalam hal ini Kemen PPN Bappenas untuk membuat Buku Metadat SDGs Edisi II. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus telah dilaksanakan Rapat Penyepakatan Metadata Indikator SDGs Edisi II Tujuan 11. Rapat ini membahas perbaikan buku metadata SDGs Edisi I baik dari segi sumber data serta rumus untuk menentukan capaian indikator. Dalam prosesnya masing-masing KL yang berkaitan dengan pemenuhan sumber data disetiap indikator akan di konfirmasi ulang terkait ketersediaan data dan konfirmasi terkait rumus perhitungan yang digunakan apakah sudah mampu menggambarkan indikator yang dimaksud atau belum.

Dalam Rapat Penyepakatan Metadata Indikator SDGs Edisi II Tujuan 11 ini BIG diundang untuk konfirmasi terkait indikator nomor 11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk. Dalam indikator tersebut dibutuhkan data terkait laju perluasan lahan terbangun pada kurun waktu. BIG dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) dan Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim menyampaikan kondisi ketersediaan data tersebut. PPTRA menyampaikan bahwa terdapat data Peta Neraca Lahan dan Hutan yang dapat digunakan untuk menghitung rasio laju perluasan lahan terbangun. Namun kendala pada data neraca lahan dan hutan hanya tersedia dengan unit pemetaan wilayah sungai dan administrasi

kabupaten dengan cakupan saat ini belum mengcover seluruh wilayah Indonesia. PPRT menyampaikan bahwa sumberdata untuk penentuan laju perluasan lahan terbangun adalah data penutup lahan yang ada di peta rupabumi, saat ini peta rupabumi yang telah tersedia se-Indonesia hanya peta skala 1:25.000 untuk Jawa Bali Nusa Tenggara dan 1:50.000 untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Peta rupabumi skala 1:5.000 baru mencakup kurang dari 3% target wilayah yang akan dipetakan, sehingga untuk updating peta penutup lahan belum bisa dilaksanakan. Target peta rupabumi 1:5.000 akan selesai di tahun 2024 sehingga dengan skema bisnis saat ini dimungkinkan dilakukan update penutup lahan setelah tahun 2024. Dengan kondisi data yang belum bisa disupport penuh oleh BIG saat ini, nantinya diperlukan koordinasi lanjutan dengan Bappenas terkait program-program percepatan yang diperlukan untuk pemenuhan data dalam penentuan indikator SDGs. [Noor Adhi Sakti, 2020]

**11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk**

**DEFINISI**  
Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk adalah perbandingan laju perluasan lahan terbangun (tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen atau semi permanen yang tetap air) dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang sama.

**STATUS:**  
Perlu Konfirmasi KL

- Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian ATR/BPN
- Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG
- Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, BIG
- Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas

**METODE PERHITUNGAN:**  
Formula:  
 $RLTPP = \frac{RLPT}{LPP}$

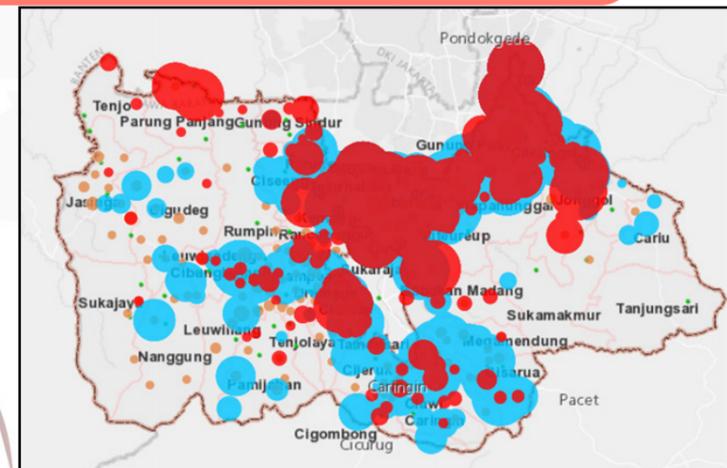
**KETERANGAN:**  
RLTPP : Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk  
LPT : Laju perluasan lahan terbangun pada kurun waktu XXXX  
YYYY  
LPP : Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu XXXX  
YYYY

**SUMBER DATA:**  
1. Data GHS yang diolah Bappenas  
2. Badan Informasi Geospasial

**DISAGREGASI:** Wilayah perkotaan fungsional  
**FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA:** N/A

**STATISTIK COVID-19 KABUPATEN BOGOR**

SUSPECT Masih Dipantau	331
SUSPECT Selesai	4369
PROBABLE Masih Dipantau	33
PROBABLE Selesai	18
PROBABLE Meninggal	196
POSITIF Aktif	599
POSITIF Sembuh	934
POSITIF Meninggal	49
TOTAL Konfirmasi Positif	1588



Sumber: <https://covid-19.bogorkab.go.id> & <https://geoportal.bogorkab.go.id/covid19/>  
\*data diakses tanggal 26 September 2020 oleh [Rochmad Budi Santoso, 2020]

